

KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH

Fiesty Utami

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email : fiesty.utami@untirta.ac.id/fiesty042@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah tentunya merupakan pengalokasian dana publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel kegiatan pengendalian dan pemantauan terhadap akuntabilitas keuangan daerah dengan di Provinsi Jawa Barat. Adapun dalam penelitian ini, kegiatan pengendalian (X_1) dan pemantauan (X_2) ialah sebagai variabel X. Sedangkan aspek untuk menjelaskan variabel Y dalam penelitian ini ialah akuntabilitas keuangan daerah. Dengan menggunakan regresi berganda pada 85 sampel, penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian (X_1) memberikan pengaruh sebesar 11.02% dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Sedangkan, pemantauan (X_2) memberikan pengaruh sebesar 5.48% dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Keuangan Daerah, Pemantauan, Pengendalian

ABSTRACT

The regional financial management is the allocation of public funds that must be accounted for. This research was conducted to determine the influence of control and monitoring activity variables on regional financial accountability in West Java Province. As in this study, control activities (X_1) and monitoring (X_2) are the X variable. Meanwhile, the aspect to explain the Y variable in this study is regional financial accountability. By using multiple regressions on 85 samples, this study shows that control activities (X_1) have an impact of 11.02% and are significant on regional financial accountability. Meanwhile, monitoring (X_2) has a significant effect of 5.48% on regional financial accountability.

Keywords: *Accountability, Regional Finance, Monitoring, Control*

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan pemerintahan dengan sistem *good governance* dan mencapai negara yang akuntabel, pemerintah telah membuat berbagai peraturan. Diantaranya, Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020 telah menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang mana daerah-daerah diwajibkan menyusun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan membuat SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah). Pengelolaan keuangan daerah saat ini harus mengalokasikan dana publik bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat daerah, yang kemudian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah ini harus diperiksa Inspektorat maupun pemeriksa eksternal yakni BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Provinsi Jawa Barat untuk ke-9 kalinya berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memutuskan untuk memberi opini WTP kepada LKPD Provinsi Jawa Barat setelah melakukan pemeriksaan catatan keuangan Tahun Anggaran 2019, beserta implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Jabar. Namun, tentunya masih ada beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. BPK menemukan sembilan kelemahan pengendalian intern dan delapan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan Tahun 2019. Adapun permasalahan yang dimaksudkan oleh BPK ialah mengenai belum sesuainya dengan ketentuan penganggaran Belanja Modal dan Belanja Barang yang belum sesuai ketentuan, belum tertibnya penatausahaan Aset Tetap, belum memadainya pemanfaatan Barang Milik Daerah, dan adanya kelebihan pembayaran di beberapa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Tahun Anggaran 2019. Permasalahan ini tentunya dapat diminimalisir dengan mengoptimalkan pengendalian intern yang baik.

Demi terkelolanya keuangan daerah dengan baik, tentunya SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) harus disusun dengan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika suatu organisasi menerapkan kegiatan pengendalian dan pemantauan secara baik, maka akan meningkatkan akuntabilitas publik dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tersebut. Sehingga, penelitian ini akan melihat pengaruh kegiatan pengendalian dan pemantauan terhadap akuntabilitas keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Penelitian dengan topik yang berkaitan telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti. Menurut Halimah (2010) adanya pengaruh sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas aset tetap. Sedangkan menurut Ikhsan (2011) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang kuat dan searah antara pengendalian intern dengan akuntabilitas publik. Mohammad dkk (2004) dalam Mulyana (2006) menyatakan bahwa esensi dari demokrasi adalah akuntabilitas. Penelitian Mulyana (2006) mengenai pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas menyimpulkan bahwa penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Pengendalian Intern dilakukan pada instansi pemerintah secara terintegrasi untuk memenuhi good governance. Untuk mengetahui hubungan dari pengendalian intern terhadap transparansi dan akuntabilitas, dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan dan hubungan dengan indikator penilaian transparansi dan

akuntabilitas. Misalnya, untuk pelaksanaan aktivitas pengendalian yang dilakukan melalui otorisasi transaksi dan aktivitas yang semestinya, pemisahan tugas yang memadai, pengendalian fisik aktivitas dan catatan, dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang memadai, bila telah dilaksanakan dengan baik akan dapat memberikan dampak pada hasil audit dari auditor eksternal berhubungan dengan pelaporan keuangan instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan upaya perwujudan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah.

TINJAUAN TEORI

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, pengendalian intern terdiri dari 5 (lima) komponen yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Namun, untuk penelitian ini peneliti hanya menggunakan 2 (dua) variabel pengendalian internal yaitu kegiatan pengendalian dan pemantauan.

Kegiatan Pengendalian

Organisasi Pemerintah tentunya wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian ini terdiri dari:

1. Review atas kinerja yang diimplementasikan dengan cara membandingkan antara kinerja yang telah dilakukan dengan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Pembinaan sumber daya manusia, yaitu dengan
 - a. Mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai
 - b. Membuat strategi perencanaan serta mentoring SDM
3. Membuat prosedur rekrutmen, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, program pendidikan dan pelatihan pegawai, uraian jabatan, sistem kompensasi, sistem penilaian kinerja, ketentuan disiplin pegawai, serta rencana pengembangan karir.
4. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang dilakukan untuk memastikan akurasi informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi meliputi: pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas akses, pemisahan tugas, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pengamanan sistem informasi, dan kontinuitas pelayanan. Lalu ada pengendalian aplikasi yang mencakup berbagai macam pengendalian, antara lain: akurasi, kelengkapan, otorisasi, dan pengendalian keandalan data, serta melakukan pengendalian fisik atas asset yang dimiliki organisasi perusahaan dengan cara identifikasi pengamanan fisik dan membuat perencanaan pemulihan setelah bencana.
5. Melakukan review atas indikator serta ukuran kinerja dalam melaksanakan penetapan dan review indikator dan pengukuran kinerja. Yang mana, pimpinan Organisasi Pemerintah harus:
 - a. menetapkan ukuran dan indikator kinerja
 - b. melakukan review serta validasi yang dilakukan dengan secara periodik atas ketetapan

- c. mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja
 - d. membandingkan capaian kinerja dengan sasaran
6. Pemisahan atau otorisasi fungsi
- Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, pimpinan Organisasi Pemerintah wajib memberikan tugas kepada pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya serta pencatatannya dan me-reviewnya dengan berkala.

Pemantauan

Pemantauan menentukan ada tidaknya kebijakan dan prosedur dirancang dan dilaksanakan oleh manajemen dilakukan secara efektif oleh karyawan. Pemantauan juga membantu memastikan kontrol yang signifikan kekurangan diidentifikasi tepat waktu dan diperbaiki. Seiring waktu, risiko baru mungkin terjadi timbul atau perubahan internal atau eksternal dapat mempengaruhi eksposur risiko lokal pemerintah.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bagian penting dari organisasi mana pun, tetapi akuntabilitas sangat penting dalam pemerintah daerah. Menurut Mulyana (2006), akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya. Pemerintah daerah harus menggunakan sumber dayanya secara bertanggung jawab untuk menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan konstituen. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas peraturan dan ketentuan yang telah disahkan oleh negara.

Akuntabilitas dalam pemerintah daerah lebih dari sekedar operasi internal yang efisien. Pada akhirnya, akuntabilitas pemerintah adalah tentang menjaga kepercayaan antara pejabat pemerintah dan warga negara.

Tuntutan masyarakat akan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah memperbaiki sistem pencatatan serta pelaporan keuangan pemerintah. Pemerintah daerah harus melakukan *vertical reporting*, yakni pelaporan kepada pemerintah atasan dan *horizontal reporting*, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas sebagai bentuk *horizontal accountability*.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011, pengertian akuntabilitas ialah sebagai berikut: akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari tugas, kewajiban, dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus dilakukan dengan mendayagunakan secara optimal sumber daya dan potensi yang tersedia secara benar dengan hasil yang terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah tidak hanya perlu beroperasi secara sah dan etis, tetapi mereka perlu bekerja keras untuk menghindari kesan tidak pantas. Akuntabilitas harus menjadi perhatian semua pegawai pemerintah daerah, bukan hanya pejabat terpilih. Pemerintah tidak akan dapat menjalankan perannya jika warganya tidak mempercayai semua pegawai pemerintah untuk membuat keputusan yang demi kepentingan terbaik untuk masyarakat.

Kegiatan Pengendalian, Pemantauan, dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

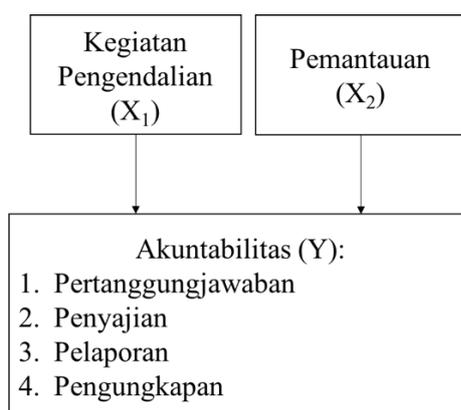
Untuk mengetahui hubungan dari kegiatan pengendalian dan pemantauan terhadap akuntabilitas, dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan dan hubungan dengan indikator penilaian akuntabilitas. Pelaksanaan aktivitas pengendalian yang dilakukan melalui dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang memadai, pemisahan tugas yang memadai, pengendalian fisik aktivitas dan catatan, otorisasi transaksi dan aktivitas yang semestinya, bila telah dilaksanakan dengan baik akan dapat memberikan dampak pada hasil audit dari auditor eksternal berhubungan dengan pelaporan keuangan instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan upaya perwujudan akuntabilitas keuangan pemerintah.

Menurut Halimah (2010) adanya pengaruh sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas aset tetap. Sedangkan menurut Ikhsan (2011) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang kuat dan searah antara pengendalian intern dengan akuntabilitas publik. Pengendalian Intern dilakukan pada instansi pemerintah secara terintegrasi untuk memenuhi *good governance*. Untuk mengetahui hubungan dari pengendalian intern terhadap transparansi dan akuntabilitas, dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan dan hubungan dengan indikator penilaian transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, untuk pelaksanaan aktivitas pengendalian yang dilakukan melalui pemisahan tugas yang memadai, otorisasi transaksi dan aktivitas yang semestinya, dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang memadai, pengendalian fisik aktivitas dan catatan, bila telah dilaksanakan dengan baik akan dapat memberikan dampak pada hasil audit dari auditor eksternal berhubungan dengan pelaporan keuangan instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan upaya perwujudan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah.

Melalui kegiatan pengendalian dan monitoring dapat diketahui apakah suatu kegiatan/ aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana, target, instruksi, prosedur, atau prinsip-prinsip yang ditentukan, dapat diketahui kesulitan-kesulitan atau kendala, kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki, kemudian apabila ada penyimpangan-penyimpangan maka dapat terdeteksi sedini mungkin sehingga semua rencana dapat terlaksana secara efisien dan efektif, dan dapat meningkatkan akuntabilitas.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat diketahui bahwa ada keterkaitan antara kegiatan pengendalian dan monitoring dengan akuntabilitas. Dengan adanya kegiatan pengendalian serta pemantauan diharapkan akuntabilitas akan meningkat. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun model penelitian ini ialah sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini yaitu:

H₁: Kegiatan Pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

H₂: Pemantauan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

METODE PENELITIAN

Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu kegiatan pengendalian sebagai X₁, pemantauan sebagai X₂, dan akuntabilitas keuangan daerah sebagai Y.

Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variable penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Independen

Variabel dan Dimensi	Deskripsi	Skala
Kegiatan Pengendalian (X ₁)	a. <i>Review</i> kinerja Instansi	Ordinal
	b. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi	Ordinal
	c. Review atas indikator dan ukuran kinerja	Ordinal
	d. Pemisahan fungsi	Ordinal
	e. Otorisasi kejadian yang penting,	Ordinal
	f. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian	Ordinal
	g. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.	Ordinal
	h. Dokumentasi yang baik	Ordinal
Pemantauan (X ₁)	a. Pemantauan berkelanjutan	Ordinal
	b. Evaluasi terpisah	Ordinal

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Dependen

Variabel dan Dimensi	Deskripsi	Skala
Kejelasan informasi	Penyediaan informasi yang jelas	Ordinal
Kemudahan akses informasi	Kemudahan akses informasi.	Ordinal
Mekanisme pengaduan	Adanya suatu mekanisme pengaduan	Ordinal
Arus informasi	Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan.	Ordinal
Pertanggungjawaban	Menyajikan laporan keuangan yang bertujuan umum.	Ordinal
Penyajian	a. Informasi menggambarkan yang seharusnya disajikan b. disusun dan disajikan dengan basis akrual. c. berdasarkan basis kas.	Ordinal
Pelaporan	a. Laporan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. b. Laporan Keuangan memenuhi peranan dan tujuan laporan keuangan.	Ordinal
Pengungkapan	a. Laporan keuangan mengungkapkan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. b. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan ditempatkan pada CaLK.	Ordinal

Pengumpulan Data

Pembagian kuesioner penelitian yang digunakan adalah kuesioner tertutup, yakni seperangkat daftar pernyataan dengan kemungkinan jawaban yang disediakan dengan menggunakan skala Likert dengan skala 5, dan responden memilih salah satu dari lima alternatif jawaban tersebut. Dalam penelitian ini digunakan skala Likert, karena dalam penelitian ini yang diukur adalah persepsi/pendapat dan sikap responden. Kuesioner diberikan kepada pegawai bagian keuangan pada masing-masing 19 OPD yang merupakan OPD yang memiliki pendapatan dan belanja.

Jumlah OPD Provinsi Jawa Barat sebesar 47 OPD. Sampel yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 19 OPD dengan pertimbangan:

1. OPD yang dijadikan sampel ialah OPD Penghasil. Maksud dari OPD Penghasil, ialah OPD yang menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. OPD Penghasil di Provinsi Jawa Barat ada 22 OPD.
2. OPD yang dijadikan sampel tidak termasuk rumah sakit daerah (Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat), karena rumah sakit memiliki pengelolaan

keuangan tersendiri. Maka jumlah sampel OPD Penghasil ada 19 OPD.

3. Responden dari OPD yang dijadikan sampel diprioritaskan kepada pegawai pada bagian keuangan. Masing-masing OPD akan menerima 5 kuesioner, sehingga total yang dibagikan ialah sebanyak 95 kuesioner.

Selain itu, pengambilan sampel ini pun berdasarkan perhitungan *Proportionate Stratified Random Sampling*, menurut Slovin (dalam Umar 2016) yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Persentasi kelonggaran karena ketidakpastian yang masih ditolerir 5%-10%

Maka, perhitungannya adalah sebagai berikut ini:

$n = \frac{47}{1+47 (0.06)}$

$$n = 12,3$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari populasi yang berjumlah 47 OPD, maka sebaiknya diambil sampel lebih dari 13 sampel OPD. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sampel yang penulis gunakan yaitu 19 OPD dapat dilakukan. Penulis mengambil sampel dari 1 OPD ialah 5 pegawai, sehingga jumlah sampel ialah 95 pegawai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tes Validitas dan Realibilitas

Uji validitas yang penulis lakukan ialah dengan menggunakan korelasi pearson (*Pearson Product Moment*), yaitu mengkorelasikan skor total dari masing-masing item pertanyaan.

Perbandingan nilai rhitung dan nilai rtabel dilakukan dengan *degree of freedom* (df)= n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jumlah sampel penelitian ini ialah 85. Sehingga besarnya df dapat dihitung 85-2=83 dengan df=83 dan alpha = 0.05 didapat rtabel = 0,213. Jika rhitung lebih besar dari rtabel dan nilai positif maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

Seluruh item pernyataan kegiatan pengendalian, pemantauan, akuntabilitas keuangan daerah memiliki nilai rhitung lebih besar dari rtabel Pearson Product Moment, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel kegiatan pengendalian, dan pemantauan, dan akuntabilitas keuangan daerah dinyatakan valid. Hasil pengujian validitas dengan menggunakan SPSS terlampir pada Lampiran.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan jika alat ukur telah dinyatakan valid, selanjutnya

reliabilitas alat ukur diuji. Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Tentunya kuesioner akan dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Sanjaya & Ghazali, 2016).

Semakin besar koefisien *Cronbach's Alpha*, yaitu mendekati nilai 1,0 maka semakin *reliable* alat ukur yang dibuat. Nunally dalam Sanjaya & Ghazali (2016) mengatakan bahwa suatu konstruk atau variabel akan dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0.70. Oleh karena itu, pengujian dengan SPSS versi 20.0 ini akan mengatakan bahwa suatu konstruk/variabel reliabel, yaitu hanya jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70.

Kegiatan pengendalian, pemantauan, dan akuntabilitas keuangan daerah memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel Pearson Product Moment, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel kegiatan pengendalian, pemantauan, dan akuntabilitas keuangan daerah dinyatakan valid.

Uji Normalitas

Uji normalitas ialah dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa sampel yang diambil dari populasi berdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan ialah dengan analisis statistik, yaitu dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai *asymetric signifcant (two tailed)* > alpha ($\alpha = 0,05$), maka data berdistribusi normal, atau sebaliknya.

Nilai Kolgomorov-Smirnov adalah 1,1421 dan tidak signifikan pada 0,05 atau nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data residual terdistribusi secara normal.

Uji Regresi

Besar pengaruh variabel X_1 dan X_2 , terhadap variabel Y, menggunakan angka Beta Standardized Coefficient. Adapun pengujian Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas ini akan dilakukan dengan menggunakan uji t. Hasil uji secara individual oleh SPSS ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.

Tabel 2. Koefisien Hasil Pengolahan SPSS Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	21,467	4,154		5,168	,000
X1	,627	,308	,332	2,036	,045
X2	,979	,425	,234	2,302	,024

Berikut di bawah ini merupakan rangkuman hasil uji t masing-masing variabel yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Pengujian P_{YX1} , P_{YX2}

No	Komponen Pengendalian Intern	Koefisien Jalur	t penelitian /hitung	t _{tabel}	Keterangan		
					H ₀	Pengaruh	Sig
1.	Kegiatan Pengendalian	0,332	2,036	1,989	H ₀ ditolak	Signifikan	5%
2.	Pemantauan	0,234	2,302	1,989	H ₀ ditolak	Signifikan	5%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa kegiatan pengendalian dengan pengaruh sebesar 11.02% terhadap akuntabilitas keuangan daerah, sedangkan pengaruh pemantauan ialah sebesar 5.48% terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komponen kegiatan penelitian yang penulis teliti adalah review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, serta dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting. Hasil data kuesioner menunjukkan bahwa seluruh komponen kegiatan pengendalian di OPD Penghasil di Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah dilakukan secara optimal. Selain itu, berdasarkan data hasil kuesioner yang kemudian dilakukan pengujian hipotesis dan analisis menunjukkan hasil simpulan bahwa kegiatan pengendalian dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan pengendalian di OPD Penghasil Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah diaplikasikan dan dilakukan dengan baik. Untuk lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, maka kegiatan pengendalian ini juga harus ditingkatkan, karena kegiatan pengendalian memiliki pengaruh secara langsung (11,02%) terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Terlebih lagi, kegiatan pengendalian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Komponen pemantauan yang penulis teliti adalah pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah. Hasil data kuesioner menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan yaitu jika ada peraturan yang dilanggar atau ada penyuaipan (mekanisme pengaduan), kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah lainnya terkait pemberian informasi keuangan (arus informasi), dan pengaksesan laporan keuangan melalui web resmi Instansi OPD atau web resmi Pemprov Jabar (kemudahan akses informasi) masih dapat ditingkatkan lagi. Padahal, berdasarkan data hasil kuesioner yang kemudian dilakukan pengujian hipotesis dan analisis menunjukkan hasil simpulan bahwa pemantauan dalam

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Maka, berdasarkan hasil dari kuesioner dan wawancara terkait pemantauan maka penulis dapat mengatakan bahwa kemudahan akses informasi, mekanisme pengaduan, dan arus informasi haruslah lebih ditingkatkan atau lebih dioptimalkan lagi. Hal ini penting untuk dilakukan demi meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, yang mana pemantauan ini dapat mempengaruhi akuntabilitas secara langsung (5,48%). Bahkan, pemantauan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Adapun hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Arfiansyah (2020) serta Sugiarti & Yudianto (2017) dengan hasil penelitian bahwa pengendalian intern mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana daerah. Tidak hanya itu, penelitian ini juga sejalan dengan Penelitian Aramide & Bashir (2015), Kewo (2017), Yesinia et al., (2018), Sari et al., (2017) serta Ichlas et al., (2014), memperlihatkan bahwa pengendalian intern memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat mengambil simpulan dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Pengaruh kegiatan pengendalian (X_1) ialah sebesar 11.02% dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
2. Pengaruh lingkungan pengendalian (X_2) sebesar 5.48% dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Saran

Peneliti yang selanjutnya dapat disarankan sebagai berikut :

1. Menambahkan variabel, yaitu misalnya Kualitas Laporan Keuangan sebagai *variabel intervening*,
2. Memperluas ruang lingkup penelitian dengan mengambil beberapa Pemerintah Kota atau beberapa Pemerintah Daerah di suatu wilayah tertentu,
3. Penelitian dilakukan lebih dari satu tahun, sehingga dapat dibandingkan perkembangannya dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Aramide, S. F. and Bashir, M. M. (2015) 'The Effectiveness of Internal Control Systems and Financial Accountability at Local Government Level in Nigeria.', (International Journal of Research in Business Management (IMPACT: IJRBM) Vol. 3 : 1-6.).
- Arfiansyah, M. A. (2020) 'Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.', (JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)), p. 3(1).
- Halimah, N. (2010) 'Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Aset Tetap Pemerintah.', *Skripsi. Bandung:*

Politeknik Negeri Bandung.

- Ichlas, M., Hasan, B. and Arfan, M. (2014) ‘Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh.’, *Jurnal Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Vol 3, No. 4 November 2014, Hal. 76-84.*
- Ikhsan, D. (2011) ‘Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.’, *Skripsi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.*
- Kewo, C. L. (2017) ‘The Influence of Internal Control Implementation and Managerial Performance on Financial Accountability Local Government in Indonesia.’, *International Journal of Economics and Financial Issues Vol. 7 Issue 1 : 293-297.*
- Mulyana, B. (2006) ‘Pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.’, *Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada.*
- Sanjaya, H. and Ghozali, I. (2016) ‘Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 (VIII).’, *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.*
- Sari, N., Ghozali, I. and Achmad, T. (2017) ‘The Effect Of Internal Audit And Internal Control System On Public Accountability: The Empirical Study In Indonesia Stae Universities.’, *International Journal of Civil Engineering and technology, 8(9) 2017, pp. 157–166.*
- Sugiarti, E. and Yudianto, I. (2017) ‘Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan ’, *Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis (SNAB), Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.*
- Tahun, P. D. P. J. B. N. 11 (2011) ‘Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.’
- Tahun, P. P. N. 60 (2008) ‘Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.’
- Yesinia, N. ., Yuliarti, N. . and Puspitasari, D. (2018) ‘Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.’, *Jurnal Aset (Akuntansi Riset), 10 (1), 2018, pp. 105–112.*